

TATA KELOLA KOLABORATIF PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE DI INDONESIA

Muhamad Efendi, Sri Juni Woro Astuti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

muhfend2@gmail.com¹, srijuniworoastuti@uwp.ac.id²

Abstrak

Tata Kelola Kolaborasi adalah bentuk kemitraan antara Pemerintah dengan pihak Swasta, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Perguruan Tinggi dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia. Tata kelola kolaboratif dilihat dari 5 aspek yaitu kondisi awal, kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pratek tata kelola kolaborasi pengelolaan ekowisata mangrove di Indonesia dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Penelitian menggunakan studi kepustakaan ini sumber data diambil dari berbagai sumber informasi dari buku, jurnal penelitian, skripsi, berita, majalah dll, tema tata kelola kolaborasi pengelolaan kawasan wisata mangrove. Pratek kolaborasi dalam pengelolaan ekowisata sebagai upaya untuk memaksimalkan tujuan yang di harapkan dan mampu saling melengkapi antar aktor yang terlibat. Diharapkan pengelolaan ekowisata di wilayah Indonesia berjalan dengan baik, karena ekowisata merupakan bagian terpenting dalam keseimbangan ekosistem, sehingga wajib dikelola secara maksimal.

Hasil dengan menggunakan teknik kepustakaan penyajian data perbandingan dari berbagai referensi diperoleh hasil dengan rincian, kondisi awal pengelolaan kawasan wisata mangrove dalam upaya pelestarian lingkungan. Kelembagaan terbentuknya visi-misi dan tujuan dari pengelolaan, serta mempertahankan kelestarian lingkungan. Kepemimpinan dinilai sudah berjalan dengan baik dengan adanya *leading sector* yaitu dari Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan. terdapatnya pembagian tugas semua aktor yang terlibat, diadakan kegiatan rapat dan diskusi. Proses kolaborasi sudah sejalan jika dilihat dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pencapaian bersama. Faktor pendukung adalah pihak pemerintah, swasta, lembaga pendidikan mendukung penuh. Sedangkan penghambat kurangnya koordinasi, sosialisasi terhadap masyarakat, dan belum ada kontrak kerjasama secara tertulis dalam bentuk MoU.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Mangrove

Abstract

Collaborative Governance is a form of partnership between the Government and private parties, communities, educational institutions, and universities in the management of mangrove tourism areas in various regions of Indonesia. Collaborative governance is seen from 5 aspects namely initial conditions, institutions, leadership, collaborative processes, supporting and inhibiting factors. This study aims to determine the success of collaborative ecotourism management practices in mangrove governance in Indonesia and determine the supporting and inhibiting factors. Research using this literature study data sources were taken from various sources of information from books, research journals, theses, news, magazines etc., the theme of collaborative governance in the management of mangrove tourism areas. Collaboration practice in ecotourism management as an effort to maximize the expected goals and be able to complement each other between the actors involved. It is hoped that the management of ecotourism in Indonesian territory will run well, because ecotourism is the most important part of the balance of the ecosystem, so it must be managed optimally.

Results using the literature technique of presenting comparative data from various references obtained results with details, the initial conditions of the management of mangrove tourism areas in environmental conservation efforts. Institutional formation of the vision-mission and objectives of management, and maintaining environmental sustainability. Leadership is considered to have run well with the leading sector, namely from Bappeda, the Fisheries Office, the Tourism Office, the Forestry and Plantation Office. there is a division of tasks for all actors involved, holding meetings and discussion activities. The collaboration process is in line when seen from face-to-face dialogue, building trust, shared commitment, and achieving together. Supporting factors are the government, private sector, educational institutions fully support. While obstacles to the lack of coordination, socialization to the community, and there is no written contract of cooperation in the form of an MoU.

Keywords: Collaborative Governance, Mangrove

Pendahuluan

Di Indonesia terkenal dengan berbagai varian suku budaya yang berbeda-beda, terutama sektor ekowisata banyak dikenal oleh wisatawan asing karena memiliki keindahan dan budaya yang mempunyai ciri khas masing-masing. Oleh karena itu tak heran ketika Indonesia akan meningkat secara pesat. CNN Indonesia (2019). Salah satu tujuan wisatawan yang menarik untuk dikunjungi khususnya untuk wisatawan mancanegara adalah ekowisata. *The International Ecotourism Society* atau TIES (1991) ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan memberi penghidupan penduduk lokal. Definisi yang dikemukakan oleh Black (1999) ekowisata merupakan wisata yang berbasis pada alam dan mengikutkan aspek pendidikan dan intepretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan secara ekologis. Luas kawasan Mangrove di Indonesia sekitar 3 juta hektare hutan mangrove disepanjang, dalam jumlah ini mencakup 23% dari keseluruhan mangrove di dunia Giri et al., (2011). Hampir disetiap daerah di Indonesia memiliki objek ekowisata sebagai salah satu unggulan sektor pariwisata.

CIFOR (2015) dalam penelitiannya bertema tentang Pakar Mangrove dan Lahan Gabut menjelaskan bahwa mangrove melindungi garis pantai Indonesia dari gelombang badai, kenaikan permukaan laut akibat tsunami. Mangrove dapat mendukung perikanan pantai dan meningkatkan pariwisata. Fokus penelitian CIFOR dan Indonesia menjelaskan bahwa ada 2,6 juta ha seperempat dari mangrove dunia yang membentang garis pantai di Indonesia, sedangkan 12% konservasi Mangrove indonesia mengurangi emini karbon negara, 52.000 ha Indonesia kehilangan mangrove per tahun. Hutan mangrove banyak ditemukan di Indonesia dan ekosistem mangrove regional penting di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Pohon mangrove tertinggi mencapai 50 meter FAO (2007). Data dari Dit. Bina Program INTAQ (1996) menyimpulkan bahwa di seluruh wilayah Indonesia luas mangrove di Irian Jaya seluas 1.350.600 ha (38%) dari keseluruhan di Indonesia, kemudian di Kalimantan 978.200 ha (28%), dan terahir area Sumatera 673.300 (19%).

Pengelolaan kawasan wisata mangrove diwajibkan sebagai kawasan lindung. SK Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 Tahun 1997 tentang penerapan jalur hijau hutan mangrove diterapkan sesuai konteks hutan mangrove di masing-masing wilayah Indonesia. Mangrove di Wilayah Indonesia menghadapi ancaman berbagai faktor, berdasarkan data dari KIARA Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (2013) ada empat (4) faktor yang dapat merusak mangrove di wilayah Indonesia diantaranya adalah:

Tabel 1. Ancaman mangrove di Indonesia

No.	Faktor
1	Konservasi untuk ekspansi industri pertambakan
2	Konservasi hutan mangrove untuk reklamasi kota-kota pantai
3	Penerapan lingkungan hidup
4	Konservasi hutan mangrove untuk meluaskan kebun sawit

Sumber: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (2013)

Pratek kolaborasi dalam pengelolaan ekowisata sebagai upaya untuk memaksimalkan tujuan yang di harapkan dan mampu saling melengkapi antar aktor yang terlibat. Diharapkan pengelolaan ekowisata di wilayah Indonesia berjalan dengan baik, karena ekowisata merupakan bagian terpenting dalam keseimbangan ekosistem, sehingga wajib dikelola secara maksimal. *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007) *Collaborative Governance* dikatakan sebagai bentuk peraturan yang mengatur satu atau lebih melibatkan lembaga publik yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam memebentuk sebuah proses pengambilan keputusan yang kolektif dalam bersifat formal, beroriensi konsensus, dan dengan cara bermusyawarah dengan sebuah tujuan mengimplementasikan kebijakan serta mengelola program sebuah aset.

Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007) ada 4 variabel utama diantaranya adalah:

1. Kondisi awal

Kondisi awal keputusan untuk melakukan praktek kolaborasi. kerjasama antara para pemangku kepentingan, antara lembaga, pemegang saham. *Stakeholder* dalam sejarahnya menghadapi satu masalah sehingga berinisiatif untuk melakukan kolaboratif. Para pemangku kepentingan memiliki visi bersama yang ingin dicapai melalui kolaborasi dan sejarah masa lalu saling bekerjasama. Masalah yang dialami yaitu ketidakseimbangan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi antara pemegang peran.

a. Ketidakseimbangan Sumber Daya

Dalam Stakeholde dalam menjalankan sebuah *Collaborative Governance* ialah jika saham kurang memiliki kapasitasnya sumber daya dalam berpartisipasi dengan *stakeholder* maka akan muncul kolaborasi pemerintah akan rawan terhadap manipulasi aktor yang lebih kuat.

b. Intensif untuk Berpartisipasi

Stakeholder yang meningkatkan intensi yang meningkat dalam berjalanya partisipasi berjalan dengan baik, sedangkan dalam pendekatan kolaboratif yang diwajibkan oleh sepihak.

c. Ketergantungan dan kerjasama

Collaborative Governance dalam sebuah prosesnya jika berhasil atau tidaknya tergantung aktor aktor yang terlibat karena anatr aktor tersebut saling ketergantungan.

2. Kelembagaan

Pemimpin yang diposisikan sebagai pemangku kepentingan dalam menjalankan sebuah keterikatan dalam kurun waktu yang berjalan akan semngkin renggang dalam kerjasamanya

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam hal ini bertujuan mengajak, mengayomi dan menjaga sebuah hubungan antar stakeholder dalam menjalankan *Collaborative Governance*. Dalam kepemimpinannya akan menganut dengan kondisi keadaan di suatu tempat sehingga dalam menjalankan kerja sama akan berkurang karena kepemimpinannya.

4. Proses kolaboratif

Dalam prosesnya collaboratif ada 3 yaitu

(1) masalah peraturan, (2) arah peraturan, (3) pelaksanaan (*Gray* dalam *Ansell & Gash*, 2007, hlm 15). Model kolaborasi dalam bentuk perubahan yang baik, dalam kolaborasi memiliki peran penting dalam pencapaian hasil yang positif ialah komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dalam berkomunikasi kolaborasi yang bersifat *face to face*.

a. *Face to face*

Collaborative governance didasarkan pada *face to face* antara pemangku kepentingan sebagai proses konsensus dan fokus terhadap keramahan. Berkomunikasi secara langsung antar aktor dalam mengidentifikasi peluang keuntungan. *Face to face* merupakan bagian kepercayaan antar stakeholder dalam menjalankan program yang ditetapkan secara bersama.

b. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan sebuah hubungan antar aktor dalam menjalin sebuah hubungan.

c. Proses pencapaian komitmen

Proses komitmen pada *Collaboratif Governance* berhubungan dengan motivasi berpartisipasi. Antar aktor yang terlibat mengamankan legitimasi dalam pemenuhan kewajiban hukum. Proses dalam komitmen menguatkan keyakinan dalam meraih suatu keuntungan bersama serta melaksanakan sebuah musyawarah bersama.

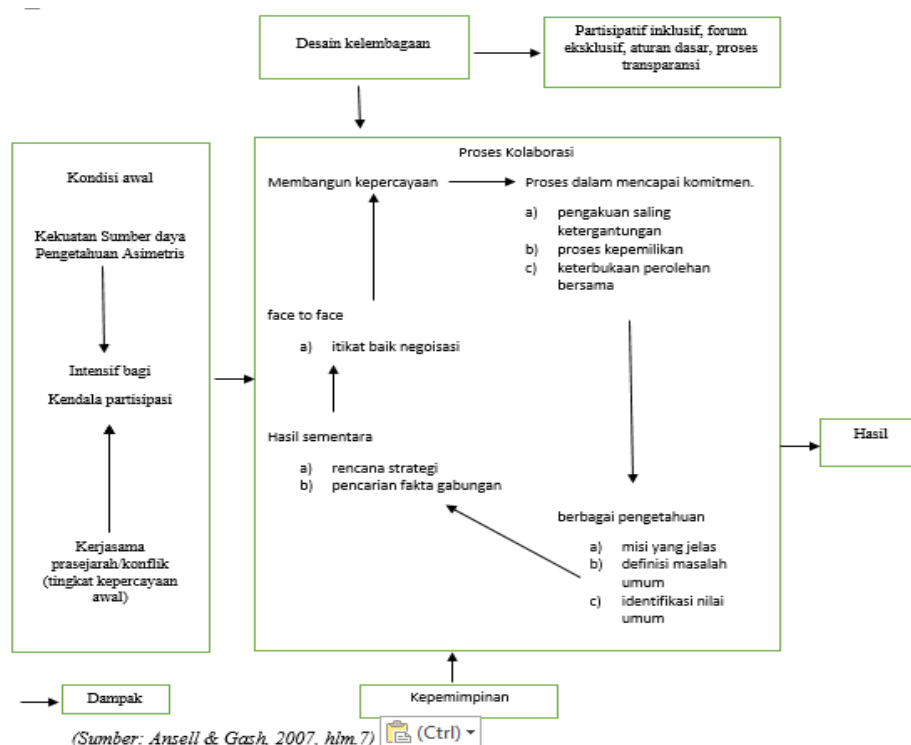
d. Pemahaman atas keputusan bersama

Pemahaman atas keputusan bersama dalam mengatasi suatu masalah dalam pelaksanaannya. Dalam proses pelaksanaannya berguna untuk mengevaluasi yang di jalankan dalam proses kolaborasi.

e. Hasil sementara

Kolaborasi mungkin terjadi ketika tujuan dan keunggulan kolaborasi relatif konkret. Dalam membangun sebuah kepercayaan antar aktor yang memiliki tujuan ambisius dalam pencapaian praktik kolaboratif.

Gambar 1. Model *Collaboratif Governance* Menurut Ansell & Gash



Donahue dan Zeckhauser mengartikan “*collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private as agent.*” Donahue dan Ricard, (2011:30) artinya bahwa suatu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana. Sedangkan menurut Holzer et al., (2012: 349) yang mengatakan bahwa *collaborative governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat. *Collaborative governance* juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan *collaborative governance* muncul karena aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Berdasarkan dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktek tatakelola kolaborasi yang dilihat dari segi dimensi kondisi awal, kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi, serta terahir faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tata kelola kolaborasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk membahas pelaksanaan tatakelola kolaborasi dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Indonesia, khususnya untuk mengambil beberapa lokasi atau objek ekowisata dari hasil penelitian terdahulu yaitu di kawasan ekowisata Mangrove Baros, Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, *Clungup Mangrove Conservation* desa Tambakrejo Kabupaten Malang, Mangrove Langkat Sumatera Utara dan Mangrove Bintan, Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun kelapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan ‘jawaban sementara’ dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindak lanjuti. Dengan kata lain penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan (Zet, Mestika, 2014)

Studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir:1988). Penelitian studi kepustakaan dapat melihat dari beberapa referensi hasil penelitian sebelumnya seperti jurnal, skripsi, buku yang sesuai dengan jenis penelitiannya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti (Sarwono, 2006).

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian studi kepustakaan maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu mengumpulkan dari berbagai sumber informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material ada di kepustakaan (Mardalis, 1999) apapun sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data decumenter yaitu dari hasil penelitian terdahulu, media massa, laporan-laporan dan lain sebagainya yang relevan dengan fokus penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dengan cara mencari sebuah data mengenai variabel bentuk catatan buku, jurnal, penelitian skripsi, media internet Arikunto (2010). Teknik penelitian ini mengklarifikasi dari

beberapa sumber penelitian yang sebelumnya sudah di teliti dari berbagai wilayah Indonesia yang sesuai dengan tema tatakelola kolaborasi ekowisata, kemudian di analisis sesuai dengan fokus dan dimensi yang di teliti.

Analisis data adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana (Zed, 2004:70). Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut di seleksi atas dasar relevansinya (Mantra, 2008:123). Untuk menjaga sebuah kesalahan dalam pengkajian dan mencegah adanya mis – informasi (kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena dalam penulisan atau kekurangan penulis pustaka) maka akan dilakukan pengecekan antar pustaka untuk meminimalisir kesalahan dan memperhatikan komentar dari pembimbing Sutanto (2005).

Hasil dan Pembahasan

Collaborative Governance menurut Anshel dan Gash (2007) menjelaskan bahwa sebagai bentuk peraturan yang mengatur satu atau lebih melibatkan lembaga publik yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam membentuk sebuah proses pengambilan keputusan yang kolektif dalam bersifat formal, berorientasi konsensus, dengan cara bermusyawarah dengan tujuan mengimplementasikan kebijakan serta mengelola program sebuah aset.

Selanjutnya dalam teorinya Anshel dan Gash (2007) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* memuat 4 dimensi yaitu pertama, dimensi tatakelola kolaboratif kondisi awal, kedua dimensi tatakelola kolaboratif kelembagaan, ketiga dimensi tatakelola kolaboratif kepemimpinan, dan keempat ada proses kolaboratif yang memuat 3 sub dimensi adalah (masalah peraturan, arah peraturan, pelaksanaan). Berikut penjelasan masing-masing dimensi dalam pelaksanaan tatakelola kolaboratif pengelolaan kawasan wisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia.

1. Dimensi Tata Kelola Kolaboratif Kondisi Awal

Dimensi tatakelola kolaboratif kondisi awal yaitu, awal mula terbangunnya kawasan hutan mangrove dalam upaya mencegah kerusakan alam. Menjalankan

kerjasama antara pemangku kepentingan, antar lembaga, pemegang saham. Para aktor yang terlibat memiliki tujuan yang dicapai melalui kolaborasi. Dalam dimensi ini akan membahas tentang pertimbangan mendorong dibukanya wisata mangrove tersebut serta tujuannya, pihak siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove, dan menganalisa peran keseimbangan *stakeholders* dalam praktek tatakelola kolaboratif. Selanjutnya penelitiannya Prasetyaningsih, Aniek dan Djoko Raharjo (2018) menjelaskan bahwa Ekowisata Mangrove Baros kondisi awalnya merupakan sebuah wilayah terbangun secara alami dengan berbagai satwa tumbuhan mangrove yang ada pengenalan dari lembaga luar. Tanaman mangrove pertama kalinya di perkenalkan oleh lembaga LSM Lingkungan di Yogyakarta tepatnya pada tahun 2003 sampai 2005 program konservasi di wilayah Sungai Opak, dengan tujuan untuk penyelamatan wilayah karena arus laut dan limbah.

Dalam perkembangannya tahun 2007, pihak KMB RC DIY melakukan musyawarah dengan kelompok masyarakat di wilayah Dusun Baros tentang kelanjutan pengelolaannya. Aktor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan ditingkat Propinsi DIY, dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Propinsi DIY berpartisipasi mendukung pengembangan kawasan mangrove tepatnya di Dusun Baros untuk dijadikan sebagai kawasan wisata mangrove. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Umar, dkk (2019) menjelaskan pengembangan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke tepatnya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada awalnya pengelolaan terjadi permasalahan-permasalahan di dalam internal yang sulit untuk dipecahkan, pembangunan yang tetap tidak memiliki kemajuan, dan kapasitas pengelolaan yang minimum karena batas kemampuan, di sisi lain kebutuhan masyarakat yang tinggi. Dalam permasalahan tersebut memunculkan ide penerapan praktek tatakelola kolaboratif yang dinilai solusi yang paling tepat untuk mendorong perkembangan pengelolaan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, dan Anwar (2019), menjelaskan bahwa kondisi awal tahun 1998 hutan mangrove sekeliling pantai di Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang ini kondisinya memfrehatinkan dikarenakan banyaknya penebangan liar oleh warga. Pada saat itu kondisi perekonomian mengalami tahap krisis. Pada tahun 2012 Bapak Saptoyo ketua Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti

Alam mengelola penghijauan di sekitar pantai clungup, inisiatif tersebut Bapak Saptoyo mulai mengajak kesadaran masyarakat sekitar untuk bergabung dalam acara tersebut. Sedangkan pertimbangan mendorong tatakelola kolaboratif adalah hilangnya hutan bakau di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2019) menjelaskan bahwa peralihan dalam penggunaan lahan hutan bakau dijadikan lahan sawit pada tahun 2000, pada saat itu banyak dikeluhkan nelayan kehilangan pendapatannya dan mengalami kerusakan lingkungan hutan mangrove yang parah.

Sedangkan pengelolaan ekowisata mangrove di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, hasil dari penelitiannya Eko, dkk (2018) dalam buku LP3M menjelaskan bahwa kondisi awal di Mangrove berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan, Provinsi Riau menjelaskan bahwa kondisi awal adalah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012 tentang arah kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove dengan tujuan meningkatkan kelestarian alam, penghasilan ekonomi dan sosial budaya. Dalam peranan tersebut melibatkan NGO, *International Tropical Timber Organization (ITTO)* yang bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Air Sungai (BP-DAS) kepulauan riau pada tahun 2012. Setelah itu bekerjasama dengan masyarakat dibentuk kelompok tani Ketapang Putih dan Medang Kenanga sepakat menjadikan mengelola ekowisata mangrove berbasis Hutan kemasyarakatan (Hkm).

Dalam dimensi tatakelola kolaboratif kondisi awal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak lepas dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 2012 Tentang “Strategi Nasional Pengelolaan Ekowisata Mangrove”. dengan menimbang salah satunya ekosistem mangrove merupakan sumber daya lahan basah wilayah pesisir dan penyangga kehidupan kekayaan alam yang bernilai tinggi sehingga perlunya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara alami untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan ditunjukkan pengelolaan ekowisata mangrove di wilayah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terbangunnya proses tatakelola kolaboratif berawal dari inisiatif masyarakat dengan membentuk sebuah kelompok. Upaya ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan mencegah dari abrasi air laut. Kemudian dalam pelaksanaan ini mendapat dukungan dari sektor swasta di bawah naungan pemerintah baik dari Dinas Pariwisata maupun dari Dinas perikanan dan Kelautan.

Sedangkan peran Pemerintah memberikan kebijakan yang digunakan untuk payung hukum perizinan tatakelola mangrove, serta memberikan pendampingan dan sosialisasi terhadap *stakeholders* yang terlibat. Dalam pelaksanaan ini sesuai jika di bandingkan dengan teorinya Mc Guire (2006) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* adalah konsep tatakelola pemerintahan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan bagi institusi pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan satu aktor dari pemerintahan saja.

2. Dimensi Tata Kelola Kolaboratif Kelembagaan

Dimensi tentang tatakelola kolaboratif pemimpin yang diposisikan sebagai pemangku kepentingan dan menjaga keharmonisan antar aktor yang terlibat dalam tatakelola kolaboratif pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove mengantisipasi sebuah keterikatan dalam kurun waktu yang berjalan akan semakin renggang dalam kerjasamanya. Dimensi ini akan membahas tentang visi-misi masing wisata hutan mangrove di berbagai wilayah Indonesia serta melihat sejauh mana visi-misi tersebut di capai, menjelaskan tentang perjanjian dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan, dan membahas tentang peraturan yang menjaga kualitas dari tempat ekowisata tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djoko, Rahardjo., dan Prasetyaningsih, Aniek (2018), Pelaksanaan program pengembangan kolaboratif untuk konservasi kawasan wisata Mangrove Baros, sebelum melaksanakan pratek ke lapangan di adakan sebuah rapat pertemuan sebanyak 2 kali pertemuan. Pertama, pertemuan forum berdiskusi diadakan di Konsorsium Mitra Bahari Regional Center DIY, dengan agenda membangun kerjasama dalam pengembangan kawasan wisata mangrove baros. Sedangkan kegiatan rapat kedua diadakan di Fakultas Bioteknologi UKDW dihadiri oleh aktor-aktor diantaranya dari Departemen Perikaanan UGM, Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW, dan menghadirkan perwakilan masyarakat Baros.

Adapun pelaksanaan berdasarkan portal *The Green Volunteers Mangrove* (2017) menjelaskan bahwa dalam upaya pelaksanaan program konservasi mangrove baros di Jogjakarta mampu menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Dalam pelaksanaan program konservasi dengan mengadakan kegiatan tanam mangrove. Selain di adakan sebuah pembinaan yaitu melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya konservasi

mangrove, membuat team kelompok inti atau pokja, merumuskan tujuan dan target yang akan dicapai, mengadakan sebuah pertemuan tentang penyusunan proposal kegiatan, dan terakhir memberikan hasil rekapan proposal kepada pihak yang membantu pendanaan program konservasi mangrove. Sedangkan hasil dari penelitian Umar, dkk (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran masing-masing aktor yang terlibat dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke LSM KPSDA-ACI berperan sebagai pengelola, aktor dari OPD menjalankan peranannya sebagai fasilitator, dan pihak masyarakat berperan pengelola dan pembangunan secara langsung. Pelaksanaan masing-masing aktor yang terlibat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai kesepakatan yang ditentukan.

Sedangkan informasi dari portal resmi Kabupaten Sinjai (2020), Bupati Sijai Bpk Andi Astapa dan wakilnya Bpk. Hj Andi Kartini Ottong tepat pada acara puncak hari jadi Kabupaten Sinjai ke 456. Bupati Sinjai membeberkan realisasi program di depan Gubernur Sulsel Prof. Dr. H. M. Nurdin Abdulah pada tanggal 27 Febuari 2020. Dengan memuat 7 poin misi, salah satunya yaitu “mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis”. Selanjutnya penelitian dari Anwar, Saiful. M & Impron, Muhamad (2019) menjelaskan Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Clungup Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, membuat sebuah strategi dalam pengembangannya gerakan edukasi secara publik mempromosikan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) ke media sosial, dalam tahap ini dipercaya mampu mempromosikan wisata untuk menarik pengunjung secara luas dan diharapkan mampu dari sektor lembaga menawarkan produk-produk yang di hasilkan.

Upaya meningkatkan kesadaran pihak Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam menyediakan layanan paket untuk wisata. Strategi ini bertujuan untuk menarik wisatawan secara luas dan bertujuan untuk peningkatan kesadaran alam. dalam proses ini CMC memberikan sebuah paket edukasi terkait mangrove Clungup memberikan bibit tanaman kepada wisatawan masyarakat. Dalam peranan ini memiliki perbedaan tersendiri karena pengunjung ikut berpartisipasi dalam pengembangannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2019) Tujuan tatakelola pengelolaan

mangrove di Langkat Sumatera Utara tujuan utamanya adalah mengembalikan kelestarian hutan mangrove yang sebelumnya di alih fungsikan sebagai kebun sawit. Pengelolaan mangrove di Langkat Sumatera Utara selain menjaga kelestarian lingkungan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat perekonomian rakyat dalam mengelola lahan tambak secara baik, mampu memaksimalkan hasil karya, dan produksi makanan yang dibuat.

Informasi tentang pelaksanaan perkembangan kawasan wisata mangrove langkat berdasarkan informasi berita dari ANTARA NEWS SUMUT (2019) dalam agenda *Focus Group Discussion* (FGD) yang dikemukakan oleh wakil Bupati Langkat Bpk. Syah Afandin menjelaskan bahwa misi-visi Kepala Daerah saat ini adalah menjadikan wilayah Langkat yang sejahtera dan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Dalam acara ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan wisata tepatnya di Mangrove Langkat. Sedangkan pada pengelolaan ekowisata Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau berdasarkan hasil penelitiannya Rendra,dkk (2019) menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat (Hkm) memegang 5 prinsip dasar prinsip ekonomi berbasis masyarakat, prinsip edukasi, pengembangan dan perencanaan kerangka kerja. Berikut penjelasan tentang prinsip pengelolaan mangrove berbasis Hkm (Prinsip Konservasi, dan Partisipasi Masyarakat) mencangkup pengelolaan keberlanjutan ekowisata aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. (prinsip Partisipasi masyarakat) memuat mengembangkan kelompok masyarakat lokal dan berkolaboratif. Sedangkan yang terahir (prinsip konservasi, dan wisata) memuat pengembangan dan penerapan dalam perencanaan kerangka kerja dalam pengelolaan ekowisata Bintan, Kepulauan Riau.

Adapun keberhasilan pencapaian pengelolaan mangrove Bintan berdasarkan Informasi yang didapatkan dari batamnws (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan tentang pengelolaan ekowisata mangrove Kabupaten Bintan, Riau. Leguna Bintan meraih penghargaan berhasil meraih penghargaan ISTA 2017 kategori sebagai Tatakelola Pariwisata Berkelanjutan dengan hadiah sebesar 50 juta. Dapat ditarik kesimpulan dimensi tatakelola kolaboratif kelembagaan, pengelolaan kolaborasi ekowisata di berbagai wilayah Indonesia mempunyai visi-misi atau tujuan yang di buat, dalam meningkatkan kerjasama masing-masing wilayah di adakan diskusi bentuk rapat dengan

tujuan mengkoordinasi tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjalin kerjasama pengelolaan ekowisata. Jika dibandingkan dengan paradigma *Collaborative Governance* menurut John Wanna (2008) “menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa kerjasama memiliki makna bekerja bersama-sama dengan pihak lain, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi”. Pengelolaan kolaborasi ekowisata di Indonesia sudah sejalan dengan paradigma John Wanna (2008) meskipun belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan belum ada visi misi khusus dari masing-masing ekowisata di setiap tempat, dan belum adanya perjanjian kontrak dengan *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan berkolaborasi.

3. Dimensi Tata Kelola Kolaboratif Kepemimpinan

Dimensi tatakelola kolaboratif kepemimpinan tujuannya adalah mengajak dan menjaga hubungan antar *stakeholders* dalam menjalankan praktek *Collaborative Governance*. Aspek kepemimpinan ini yang dibahas adalah tentang *Leading Sektor* atau aktor utama dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove tersebut, penjelasan tentang pembagian tugas masing-masing aktor, dan terakhir mengacu pada koordinasi yang dilaksanakan antar aktor dalam praktek tatakelola kolaboratif (rapat, perencanaan, atau himbauan). *Leading sector* tata kelola kolaboratif pengelolaan ekowisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pihak menjadi peran utama dalam pengelolaan ekowisata mangrove di masing-masing tempat memiliki *leading sector* yang berbeda-beda. Berikut penjelasan *leading sector* dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan mangrove di berbagai wilayah Indonesia.

Leading Sector Pengelolaan Kolaboratif di Indonesia

No.	Nama Ekowisata	Lokasi	Leading sector
1	Mangrove Baros	• Kecamatan Baros, Kabupaten Baros, DIY	• BAPPEDA Kota Bantul
2	Mangrove Tongke-Tongke	• Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	• Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai
3	<i>Clungup Mangrove Conservation (CMC)</i>	• Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang	• Dinas Pariwisata Kabupaten Malang
4	Mangrove Langkat	• Kecamatan Bradan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara	• Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat
5	Mangrove Bintan	• Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau	• Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Sumber: hasil penelitian terdahulu (2018-2019)

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Rahardjo, Djoko,. & Prasetyaningsih, Aniek (2018), menjelaskan bahwa pengelolaan melibatkan Pemerintah Bappeda bekerja sama dengan BLH, KKP Pariwisata dan Kehutanan, dalam perannya aktor tersebut melakukan penetapan terhadap program dari SKPD, serta melakukan pengawasan dan koordinator dalam pelaksanaan program dilapangan. Sedangkan pihak lain seperti sektor swasta membantu kontribusi penanaman bibit mangrove, masyarakat berperan dalam pengelolaan secara langsung dan memonitoring pelaksanaan program, pihak pendidikan berperan sebagai partisipasi penanaman pohon mangrove

Sedangkan hasil penelitian dari Umar, dkk (2019) menjelaskan pembangunan kawasan wisata hutan mangrove di Tongke-Tongke yang mengelola yaitu Dinas Perikanan, sedangkan ke dua yaitu Dinas Pariwisata dan kebudayaan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peran pemerintah leading sektor sebagai memonitor dalam bentuk dokumen rencana pembangunan, yang telah diarsipkan oleh pihak

pemerintah dilaksanakan dengan skala yang intensif insensif. Dalam pelaksanaan proses pengembangan dilakukan sebanyak 3 kali dalam 6 bulan laporan dibuat secara berjenjang, mulai dari unit bawah sampai pimpinan tertinggi. Dalam proses ini menemui sebuah kejanggalan antara pihak penanggung jawab kegiatan pembangunan dengan penanggung jawab program dikarenakan tidak adanya supervisor di lapangan sehingga mengalami kelambatan dalam memonitor pembangunan di lapangan. Selanjutnya hasil penelitian dari Anwar, M.S dkk (2019) menjelaskan bahwa Dinas Kabupaten Malang, Kementrian Pariwisata, Kementrian Kelautan dan perikanan yang paling berperan dalam pengelolaannya. Sedangkan dari kelompok masyarakat yang diwakili oleh unit Lembaga Masyarakat Konsevasi Bakti Alam membentuk sebuah unit usaha yang bernama *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) mengelola dan mengembangkan produk olahan mangrove. Pihak swasta perannya sebagai aktor pendukung utamanya adalah *sponsorship* apabila mengadakan acara, selain itu memberikan dukungan berupa sumbangan pendanaan. Peran dari sektor perguruan tinggi dari Universitas Brawijaya dan Politeknik Negeri Malang menyumbangkan pemikirannya tentang konsep pengembangan dan keseimbangan dalam pengelolaan.

Sedangkan hasil penelitian dari Putri, dkk (2019) Pihak yang mengelola hutan mangrove Langkat yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat sebuah gerakan Badan Pengelolaan Bakau (BPHM), Pusat Pengelolaan Penangkapan (BKPDAS). Pelaksanaan tatakelola kolaboratif pemerintah memberikan kebijakan bentuk peraturan sebagai payung hukum untuk masyarakat mendapatkan hak untuk mengelola mangrove, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Nomor P.3 / 2016 tentang kehutanan sosial. Peraturan ini diperuntukkan untuk masyarakat lokal yang memperoleh akses mengelola hutan melalui 5 jenis perizinan yaitu Hutan rakyat (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan terahir kemitraan kehutanan. Sedangkan buku penelitian yang dilakukan Eko, dkk (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan ekowisata mangrove Bintan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan perannya di bantu oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan\ sebagai pemimpin dan membuat sebuah kebijakan untuk payung hukum *stakeholders* yang terlibat pengelolaan, mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dalam pengelolaannya, serta melaksanakan kegiatan penginformasian, penyusunan teknis

dalam pengelolaan mangrove bintang, memfasilitasi peatihan menejemen dan pengembangan Hkm, serta melaksanakan kegiatan soialisasi terhadap stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan.

Dimensi tatakelola kolaboratif kelembagaan, jika di tarik menjadi kesimpulan bahwa proses kepemimpinan dalam tatakelola kolaboratif pengelolaan kawasan wisata mangrove di Indonesia yang menjadi leading sector berbeda-beda di setiap tempatnya yaitu Bappeda Kota Bantul, Dinas Perikanan Kbutaten Sinjai, Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Dalam peranan ini terbentuknya pembagian tugas pihak pemerintah sebagai pengayom dalam bentuk pembuatan kebijakan hak tatakelola, melaksanakan pendampingan dan berkoordinasi, sedangkan pihak swasta membantu pengelolaan berupa materi maupun sumbangan dana. Dan terahir pihak masyarakat berperan sebagai pelaksanaan praktek di lapangan dalam pengembangan kawasan wisata hutan mangrove dan mengembangkan karyanya produk lokal yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan mangrove.

Selanjutnya peran institusi pendidikan atau perguruan tinggi berperan sebagai pendukung, berpartisipasi, dan menyumbangkan pemikirannya dalam penelitian maupun pmbutan konsep pembangunan kawasan wisata mangrove di wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan tatakelola kolaboratif kepemimpinan ini jika di bandingkan sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) collaborative governankce adalah tatakelola pemerintah dimana aktor pemerintahan secara langsung ikut melibatkan aktor instansi pemerintahan (swasta, masyarakat, pendiidikan (perguruan tinggi)) pengambilan keputusan secara formal dan bertujuan untuk kepentingan bersama.

4. Dimensi Tata Kelola Kolaboratif Proses Kolaboratif

Dimensi tatakelola kolaboratif dalam perannya memuat 5 poin yaitu *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *Trust Building* (membangun kepercayaan), *commitment to process* (komitmen bersama), *shared understanding* (pemahaman bersama), *intermedite outcome* (pencapaian hasil). Dimensi ini akan membahas tentang dialog tatap muka dalam pencapain tujuannya *stakeholder* yang terlibat, pemecahan masalah dalam pelaksanaannya, serta tingkat kepercayaan dalam kerterlibatan pengelolaannya, dan

membahas tentang hubungan antara pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga pendidikan dalam menjalin kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian dari Rahardjo, Djoko., & Prasetyaningsih, Aniek (2018) Arah peraturan yang ditetapkan dalam acara workshop di Ruang Harun Fakultas Bioteknologi UKDW dengan tema Kolaborasi Aksi Konservasi pada tanggal 20 Oktober 2017, bahwa implementasinya di bawah naungan Dinas KKP DIY. Dalam acara dihadiri langsung narasumber Drs. Sigit Sapto, MM beliau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Ketua Mitra Bahari DIY Drs. Djoko Rahardjo M.Kes, dan dari Deputi Djarum Foundation Yunan Aditya. Total keseluruhan 130 peserta workshop dari mahasiswa Fakultas Bioteknologi UKDW, Departemen Perikanan UGM, Djarum Foundation, Dinas KKP DIY, dan siswa SMA 9, SMA Budya Wacana dan BOPKRI II Yogyakarta. Adapun pelaksanaan program kolaborasi aksi konservasi dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2017 agenda penanaman pohon mangrove. Di hadir langsung oleh Bupati Bantul Drs. H. Suharsono, dalam acara tersebut melibatkan 200 peserta dari masing-masing aktor yang terlibat dalam kolaborasi aksi konservasi.

Sedangkan dalam penelitiannya Umar, dkk (2019) menjelaskan proses pembangunan kolaborasi di kawasan wisata Mangrove Tongke-Tongke Dialog tatap muka secara langsung dalam komunikasi masih dinilai kurang maksimal proses kolaborasi dilakukan secara formal dan informal, belum terbentuknya jadwal rapat secara rutin. Musyawarah pembagian tugas antar aktor yang terlibat pembangunan wisata mangrove Tongke-Tongke sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam membangun kepercayaan dalam hal empati dan loyalitas dalam pembangunan menunjukkan hasil yang baik, pemerintah sebagai leading sektor turut membantu dan memberikan sebuah penyuluhan dan bibit mangrove dalam memaksimalkan pengelolaannya. Komitmen yang dilakukan dalam pengelolaan adanya pengkuan bersama tentang Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 pasal 5 tentang penyelenggaraan pariwisata kabupaten Sinjai, dan Peraturan Daerah Nomer 35 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten sinjai yang menjelaskan dalam pelaksanaan kolaborasi semua sektor terlibat secara adil.

Selanjutnya dalam penelitiannya Anwar, dkk (2019) menjelaskan bahwa, proses kolaboratif *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) menggunakan strategi

pengembangan wisata berbasis edukatif berdasarkan model *Quintuple Helix* dalam model ini sarana mendukung adanya situasi ekologi, pengetahuan, dan inovasi, sehingga dapat menciptakan sinergitas segi ekonomi, masyarakat dan demokrasi (Carayannis, 2012). Sehingga proses kolaboratif Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam dengan membentuk unit *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) tidak berjalan dengan sendirinya. Keterlibatan antar aktor yang bersinergitas adanya bantuan dari pihak swasta, universitas membantu dalam bentuk penelitian ilmiah sehingga mampu menjadi sebuah perbaikan dari segi pengelolaan maupun materi. Selanjutnya dialog antar aktor dalam berita tulisannya Putri, dkk LIPI (2019) menjelaskan bahwa upaya mengatasi koordinasi dilingkup keberadaan desa tersebut, para aktor mendorong pemerintah untuk menyusun peraturan yang berguna untuk memayungi pelaksanaan tatakelola kolaboratif di mangrove Langkat. Pada tanggal 7 Agustus 2019 LIPI bekerja sama dengan pihak Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) mengadakan sosialisasi serta membuat koordinasi perencanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk kedepannya, dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Langkat khususnya bagi nelayan.

Kepala Bappeda Kabupaten Langkat Bpk H. Sujarno, S.Sos mengkonfirmasi bahwa memasukkan program menyesuaikan dengan model kesejahteraan yang dibuat dari LIPI dalam RPJMD untuk tahun 2020, selain pihak dari kepala Bappeda Kabupaten Langkat memberi keempatan agar model kesejahteraan yang di buat dari LIPI dipublikasikan ke daerah pesisir lainnya di Kabupaten Langkat (LIPI 2019). Sedangkan proses kolaboratif di mangrove Bintan berdasarkan hasil penelitian Eko,dkk (2018) menjelaskan bahwa proses kolaboratif hubungan antara *International Timber Tropical Organzation* (ITTO) sebagai aktor yang paling berpengaruh terhadap jalannya Implementasi Hkm di ekowisata Bintan, Riau. Kemudian didukung oleh instansi Pemerintah daerah seperti Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) kepulauan Riau, Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Riau, Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Bintan, Pemerintah Desa Sembung dan Kelompok tani Hutan Ketapang Putih Medang Kenanga yang saling bertimbal balik saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan pratek tatakelola kolaboratif.

Kepercayaan aktor yang terlibat dalam tatakelola kolaborasi di ekowisata mangrove di Kabupaten Bintan dibentuk kerjasama masyarakat dengan ITTO mulai mendapat kepercayaan, dengan harapan rehabilitasi ITTO kepada masyarakat dalam aspek keterbukaan dalam kesediaan masyarakat dalam bergaji informasi seputaran pengelolaan mangrove Bintan, saling tukar pendapat untuk membantu jalannya pelaksanaan, dukungan komunikasi aktor masyarakat dengan ITTO, bekerja sama dalam pencapaian kesuksesan program bersama. Jika ditarik sebuah kesimpulan dimensi tatakelola kolaboratif proses kolaboratif ini adalah adanya pelaksanaan kegiatan rapat diskusi, penyuluhan, dan pendampingan yang menghadirkan semua aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove di masing-masing tempat wilayah Indonesia. Penerapan dalam pelaksanaan tatakelola kolaboratif di masing-masing wilayah Indonesia sudah berjalan dengan baik saling bersinergi dalam pengelolaannya.

Sedangkan jika dilihat dari pencapaian visi-misi belum berjalan dengan maksimal hal ini ditunjukkan bahwa masih adanya kesalahpahaman dalam berkoordinasi antar aktor, sedangkan pihak masyarakat kurang maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan batasan pengetahuan dan minimnya sosialisasi tentang pemanfaatan mangrove dengan benar. Jika dikaitkan dengan teorinya Fosler dalam tulisan Dwiyanto (2011:253) menjelaskan bahwa dalam kerjasama secara kolaboratif visi-misi sebagai dasar para *stakeholders* untuk mencapai sebuah tujuan, strategi, sumberdaya dan masing-masing instansi yang terkait mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi-misi yang di sepakati.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tata Kelola Kolaboratif

Dimensi terakhir ini menjelaskan tentang faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan praktek tatakelola kolaboratif pengelolaan kawasan wisata di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga dalam dimensi ini akan membahas faktor pendukung dan penghambat dari berbagai wilayah berdasarkan media penelitian (jurnal, buku, skripsi), berita, ataupun majalah. Pelaksanaan program kolaborasi aksi konservasi di kawasan ekowisata mangrove Baros di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djoko, Rahardjo, & Prasetyaningsih, Aniek (2018), dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program kolaboratif aksi konservasi

mendapat respon yang baik dari aktor pemerintah Bappeda, BLH, KKP, Pariwisata, Kehutanan. Keseluruhan aktor-aktor yang terlibat bersinergi dalam menjalankan program kolaborasi aksi konservasi mangrove Baros.

Selanjutnya penelitian dari Umar, dkk (2019) dalam penelitiannya menjelaskan aktor pendukung dan menghambat dalam pembangunan wisata hutan mangrove Tongke-Tongke di Sulawesi adalah mampu menjadikan mangrove tumbuh dengan subur sehingga meningkatkan kualitas wilayah, banyak pengunjung dari pejabat pemerintah, lembaga penelitian, penunjang lokal maupun dari luar karena memiliki pesona yang menarik untuk dikunjungi. Disisi lain masyarakat sekitar diuntungkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Hambatan dalam pembangunan pariwisata mangrove Tongke-Tongke adalah belum adanya jadwal yang terstruktur dalam pengelolaannya, agenda rapat partisipasinya masih kurang dengan di tunjukkan ada yang tidak mendatangi diacara rapat pengelolaan. Kesepatan bersama belum ada belum ada perjanjian secara formal yang disepakati oleh keseluruhan aktor yang terlibat pengelolaan dan *job description* dalam perannya.

Selanjutnya hasil penelitian dari Anwar, dan Muhamad (2019) menjelaskan pengembangan kolaborasi wisata berbasis edukasi di kawasan wisata mangrove Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang kesadaran masyarakat tergolong tinggi, terutama dari pihak Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam yang membentuk sebuah unit *Clungup Mangrove Conservation* (CMC). Mampu mengajak dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove. Dukungan dari aktor pemerintah yang memfasilitasi tempat, sedangkan dari perguruan tinggi yang menyumbangkan pikirannya membuat konsep pengembangan membantu untuk mengevaluasi di setiap kegiatannya, sedangkan pihak swasta mendukung sebagai sponsorship ketika mengadakan sebuah acara, dan membantu sumbangan dana untuk pembangunan di *Clungup Mangrove Conservation* (CMC). Hambatan dalam pelaksanaan pengembangan kolaboratif wisata hutan mangrove di Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang ini adalah kurangnya perhatian penuh dari pemerintah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Anwar, dan Muhamad (2019) informan bernama Iswahyuni anggota dari CMC pemerintah hadir dalam pemberian ijin untuk

mengelola pantai Clungup. Selibuhnya untuk keterlibatan pengelolaannya belum adanya dukungan secara penuh.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2019) Faktor yang mendukung dalam mengelola hutan mangrove dari pengalihfunsian sebagai kebun sawit. Setelah masyarakat mengalami krisis ekonomi dan semakin rusaknya hutan bakau di Langkat kesadaran masyarakat tinggi sehingga mendesak perusahaan kelapa sawit segera meninggalkan tempat tersebut. upaya tersebut didukung pemerintah melalui Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.83 / 2016 tentang Kehutanan Sosial sebagai payung hukum dari masyarakat dalam hak tatakelola hutan bakau. Kendala dalam pelaksanaan praktek tatakelola pengelolaan hutan bakau di Langkat Sumatera Utara menemukan beberapa kendala hal ini dijelaskan pada penelitian Putri, dkk (2019) diantaranya adalah pengakuan dalam keberhasilan pengelolaan dan keberadaan kelompok memiliki ijin yang berbeda sehingga menimbulkan saling tunding antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan. Pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah lebih cenderung pada suatu kelompok sehingga memunculkan kecemburuan sosial. Pelaksanaan dalam peternakan udang payau di lahan bakau mengalami sebuah kegagalan hal ini dijelaskan pada penelitian Putri, dkk (2019) dikarenakan kurang pengalaman dan sosialisasi tentang tatacara berternak udang tersebut.

Sedangkan faktor yang mendukung tatakelola kolaborasi pengelolaan mangrove di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam buku yang ditulis Eko,dkk (2018) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan ekowisata mangrove Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau berdasarkan sumber laporan kegiatan review dan analisis kebijakan pengelolaan ekowisata mangrove berbasis Hkm (2013 data olahan 2017). Aktor yang mendukung secara *stakeholders* primer langsung yaitu pihak pemerintah desa bertujuan mengatasi kemiskinan melalui pengembangan alternatif mangrove, dan memperoleh pendapatan untuk kas desa pembangunan fasilitas . BPD, Kelompok Tani Hutan.

Sedangkan dukungan secara *stakeholders* primer tidak langsung yaitu Bupati dan DPRD bertujuan Pengelolaan administrasi keberhasilan memberikan dukungan kepemimpinan dan politik. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Kepulauan Riau bertujuan Pembangunan wilayah ekowisata mangrove dan

pemberdayaan masyarakat. OPD Kabupaten Bintan Mengelola mangrove sesuai sektor masing-masing, sedangkan dukungan secara primer menerlibatkan dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia yang kesinambungan pembangunan kehutanan dan stabilitas nasional, dan aktor dari *International Tropical Organization* (ITTO) mendukung kontrol sosial dan kerjasama program. Adapun hambatan dalam tatakelola kolaboratif pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau berdasarkan buku yang di tulis Eko, dkk (2018) yaitu dalam penerapannya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Hkm masih rendah dengan ditandai permasalahan permasalahan tentang pengelolaan skema Hkm belum mendapat informasi secara penuh, dikarenakan sosialisasi dari pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan, pendampingan masih rendah.

Selanjutnya hambatan pengelolaan kolaborasi mangrove berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan yaitu, kebijakan pemerintah daerah belum ada pengelolaan mangrove berbasis Hkm hanya di perkokoh dengan SK Menteri Penetapan Republik Indonesia SK.114/Menhut-II/2014 tentang penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan yang ditetapkan di Desa Busung dan Desa Sempang, Kabupaten Bintan. Pelaksanaan pengelolaan mangrove berbasis Hkm dari pemerintah Daerah diperkuat secara tidak langsung dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Bintan, 2011-2031. Sedangkan dari kepala Desa hanya memperkuat dalam bentuk surat keputusan Kepala Desa No.11/DBS/2012. Dalam peranannya sesuai amanat Undang-Undang kepala desa membuat sebuah peraturan khusus sehingga bisa memperkuat payung hukum dan memiliki jaminan dengan *stakeholders* dalam berkolaborasi.

Adapun pelaksanaan tata kelola kolaboratif pengelolaan kawasan wisata mangrove di Indonesia, dimensi ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung adalah masyarakat mempunyai tekad dalam pengelolaan mangrove dengan upaya mencegah kerusakan lingkungan, sedangkan instansi pemerintah memberi dukungan dalam bentuk pembimbingan dalam bentuk mengadakan forum musyawarah, dan pembuatan sebuah program. Selain itu masyarakat memberi perlindungan terhadap semua *stakeholders* yang terlibat dalam bentuk peraturan daerah, kabupaten, maupun dari pusat tentang hak kelola kawasan wisata mangrove. Sedangkan setiap pengelolaan kolaboratif kawasan

wisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia dalam perannya menerlibatkan pihak swasta yang ikut membantu dalam bentuk sumbangan dana maupun membantu kebutuhan fasilitas dalam pembangunannya. Kesimpulan dalam dimensi dukungan tatakelola kolaboratif sejalan dengan teorinya Ansell dan Gash (2007:3) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah pengaturan tata kelola instansi pemerintah yang melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah non-pemerintah secara langsung membuat peraturan secara formal, berorientasi konsensus, dan koonsutatif., dengan bertujuan membuat dan menerapkan kebijakan maupun menjalankan program, aset secara publik.

Sedangkan faktor penghambat dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan mangrove di berbagai wilayah Indonesia yaitu masyarakat mempunyai inisiatif yang baik tetapi kurangnya keseimbangan dalam pendampingan dan sosialisasi yang terstruktur dari pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan baik dari tatacara pengelolaan mangrove yang baik, pembuatan produk lokal mangrove, maupun kerajinan tangan yang di lakukan. Jika dilihat dari permasalahan ini pentingnya pelatihan, pendampingan, dalam peksanaan tata kelola kolaboratif pengelolaan mangrove di berbagai wilayah Indonesia masih belum terpenuhi jika di dibandingkan dengan teori dari Grey dalam Fendt (2010:19) menjelaskan bahwa kolaborasi adalah proses adanya saling pengertian dari aktor masih mempunyai keterbatasan dalam pengelolaan kemudian mengumpulkan segala permasalahan tersebut untuk diselesaikan bersama yang menghasilkan solusi.

Penutup

Pengembangan kawasan wisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia, dapat di simpulkan sebagai penerapan praktek Collaborative Governance berdasarkan teori Ansell dan Gash (2017) memuat 5 dimensi yaitu Kondisi Awal, Kelembagaan, Kepemimpinan, Proses Kolaborasi, dan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia, berikut penjabaran kesimpulan dari masing-masing dimensi:

1. Kondisi Awal

Kondisi awal dibukanya kawasan wisata mangrove di berbagai wilayah indonesia adalah upaya mengantisipasi kerusakan alam, sehingga memunculkan keputusan untuk

melestarikan khususnya hutan mangrove. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar ikut berpartisipasi mengelola membentuk sebuah kelompok dalam pelaksanaan program.

2. Kelembagaan

Pengelolaan kawasan wisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia mempunyai tujuan masing-masing sesuai dengan visi-misi yang ditetapkan dari pemerintah pusat. Perjanjian dalam berkolaborasi antara pemerintah dengan swasta belum ada perjanjian kontrak dalam dukungan bersifat sukarela. Sedangkan upaya dalam pelaksanaan program konservasi pemerintah mengadakan peraturan khusus untuk pengunjung supaya tidak membuang sampah sembarangan. Pelaksanaan ini sudah sejalan dengan dimensi ini walaupun belum berjalan dengan maksimal karena rendahnya kesadaran dalam pelestarian lingkungan.

3. Kepemimpinan

Pihak yang menjadi *leading sector* tata kelola kolaboratif ekowisata mangrove di Indonesia memiliki perbedaan di setiap wilayah, aktor yang menjadi *leading sector* adalah Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, dan Dinas Kehutanan. Peran sebagai *leading sector* sebagai pemangku kepentingan yang memberikan pendampingan, sosialisasi, dan memberikan payung dalam bentuk kebijakan tata kelola wilayah mangrove, sedangkan tugas dari aktor swasta sebagai pendukung pendanaan, masyarakat di kategorikan sebagai pemeran langsung dalam pengelolaan, dan terahir dari sektor pendidikan atau perguruan tinggi sebagai partisipasi dan membantu dalam pikirannya membuat penelitian untuk evaluasi kedepannya, dan membuat konsep pengembangannya.

4. Proses Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi *face to face dialogue* (dialog/tata muka) pelaksanaan pengembangan mangrove dalam merencanakan di adakan agenda rapat diskusi tentang tujuan yang akan di capai, sehingga dalam pelaksanaan ini mampu untuk membangun kepercayaan (*trust building*) untuk semua *stakeholders* yang terlibat. komitmen bersama (*commitment to process*) dalam pengelolaan ini adalah meningkatkan kesejahteraan bersama dan pelestarian lingkungan, sedangkan pemahaman bersama (*shared understanding*) landasan payung hukum dalam berkolaborasi adalah kebijakan hak

tata kelola wilayah mangrove dari pemerintah daerah maupun pusat, pencapaian hasil (*intermediate outcome*) yang dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan kawasan wisata mangrove di berbagai Indonesia adalah mampu menambah penghasilan daerah, membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan mengembangkan potensi kreatifitas dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan.

5. Faktor pendukung dan Penghambat dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove di wilayah Indonesia

a. Faktor Pendukung

1) Tersedianya Landasan Perizinan

Pelaksanaan tata kelola kolaboratif pengelolaan kawasan wisata mangrove di berbagai wilayah Indonesia mendapat payung hukum berupa kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pusat tentang perizinan hak tata kelola yang dijadikan sebagai pondasi.

2) Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata mangrove mengadakan forum rapat diskusi, melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terhadap *stakeholders* yang terlibat.

3) Dukungan dari Pihak Swasta

Memberikan dukungan dalam bentuk kontribusi sumbangan pembangunan fasilitas dan pendanaan.

4) Dukungan dari Masyarakat

Mendapat dukungandari masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan pengembangan wisata mangrove dalam upaya melestarikan alam, dan meningkatkan kesejahteraan bersama dalam memaksimalkan program dan produk olahan yang dikembangkan.

5) Dukungan dari lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi)

Peran lembaga pendidikan berpartisipasi sebagai penanaman pohon mangrove, dan dari perguruan tinggi menyumbangkan pemikirannya lewat penelitiannya sebagai bahan evaluasi, serta membantu membuat konsep pembangunan untuk kedepannya.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam berkolaborasi ini adalah kurangnya jadwal sosialisasi kepada masyarakat secara terstruktur sehingga pelaksanaan dalam pengembangan sedikit

terhambat. disisi lain kesadaran masyarakat masih kurang maksimal. sedangkan sebagian besar tata kelola kolaboratif pengelolaan ekowisata mangrove di berbagai wilayah indonesia belum adanya perjanjian kontrak sama pihak swasta, pelaksanaan secara sukarela dalam membantu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ditarik menjadi saran tentang tata kelola kolaboratif pengelolaan kawasan wisata mangrove di Indonesia yaitu:

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran Masyarakat dalam terlibat tata kelola kolaborasi pentingnya konsep konservasi pelestarian alam harus ditingkatkan.

2. Sosialisasi dan Pendampingan

Peran masyarakat dalam mengelola secara langsung perlunya sebuah pengarahan dan pendampingan dalam pelaksanaannya sehingga sesuai dengan tujuan yang di diharapkan.

3. Visi-Misi

Perlunya dalam pembuatan visi-misi khusus dari kawasan wisata mangrove di masing-masing wilayah.

4. Peraturan

Perlunya peraturan khusus dalam menjaga kelestarian lingkungan yang di tetapkan dari daerah. Serta adanya perjanjian kontrak dengan sektor lain dalam keterlibatannya.

Daftar Pustaka

- Aesong, Yurisal D (2015). Warna warni hukum. Tinjauan Singkat Tentang Ekowisata Di
- Aida, Nur Rohmi (2019) Sabtu, 13 juli 2019 10.02 WIB. KOMPAS.com. 7 Hutan Mangrove di Indonesia, Pelindung Abrasi yang Wajib Dikunjungi. Diakses <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/travel/read/2019/07/13/100200527/7-hutan-mangrove-di-indonesia-pelindung-abrasi-yang-wajib-dikunjungi>
- Batam.news. (2018). Laguna, UKM dan Masyarakat Gagas Wisata Kelas Dunia di Bintan. Diakses: <http://batamnews.co.id/berita-28945-laguna-ukm-dan-masyarakat-gagas-wisata-kelas-dunia-di-bintan.html>

- CCN Indonesia (2019) Rabu, 20/03/2019 16:34 WIB Meneropong' Ekowisata di Indonesia. Di akses <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190320161452-269-379113/meneropong-ekowisata-di-indonesia>. Pada 20 Januari 2020.
- CIFOR dan Indonesia (2015). Kemitraan untuk hutan dan manusia. Diakses: www.cifor.org >BCIFOR1402PDF Hasil web CIFOR dan Indonesia
- Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Jogjakarta. Potensi dan Peluang Ekowisata Kawasan Konservasi Mangrove. Diakses : https://dislautkan.jogjaprov.go.id/web/detail/123/potensi_dan_peluang_ekowisata_kawasan_konservasi_mangrove
- Foresh digest (2019). 05 September 2019. 5 Alasan Mengapa Kita Harus Melindungi Mangrove. Diakses <https://www.forestdigest.com/detail/352/5-alasan-mengapa-kita-harus-melindungi-mangrove>
- Impron, Muhamad. M. Saiful Anwar. (2019). Strategi Kolaborasi Pengembangan Wisata Berbasis Edukasi di Clungup Mangrove Conservation Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Indonesia. diakses <http://warna-warni-hukum.blogspot.com/p/ekowisata.html>
- Inthan Adhi Perdana Putri. Antika Zahra. Imam Syafii. Dedi Adhuri. Mochammad Nadjib. & Triyanto (2019). Saving Mangrove, Saving People: Fish-Collab, A Collaborative Governance Approach for Protecting Mangrove in Langkat, North Sumatera Indonesia. Economic Research Centre, Indonesian Institute of Sciences, Centre for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences, Research Centre for Society and Culture, Indonesian Institute of Sciences, Research Centre for Limnology, Indonesian Institute of Sciences.
- Marwiyah, S.H.M.Kn. (2019). 18/10/2019. 20.22. SUARA INDONESIA. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Diakses https://m.suaraindonesia.co.id/read/10588/20191018/202206/ekowisata-dan-pembangunan-berkelanjutan#-_-
- Merzaqon, Abdi T. Dr.Budi Purwoko,S.Pd. M.Pd. (2017) STUDI KEPUSTAKAAN MENGENALI LANDASAN TEORIDAN PRAKTIK KONSELING EXPRESSIVE WRITING. Diakses <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/22037>
- Mulyani Citra Setiawati. IDN TIMES (2019). Memasuki 5 Tahun Jokowi-JK, Nawacita merupakan 9 program prioritas Jokowi-JK. Diakses: <https://www.idntimes.com/new/indonesia/mulyani-citasetiawati/memasuki-5-tahun-jokowi-jk-semua-nawacita-sudah-terlaksana>
- Muzwardi, Ady., Eko Priyo Purnomo, Rijal Ramdani, Rendra Setyadiharja, (2018), COLLABORATIVE GOVERNANCE Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2011), No 50 Tahun 2011 pasal 51-52, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- Portal ANTARA SUMUT. (2019), FGD Pemkab Langkat membangun visi misi religius [Web log post]. (2019, September 23). Diakses: <https://sumut.antaranews.com/berita/245826/fgd-pemkab-langkat-membangun-visi-misi-religius>
- Portal DIREKTORAT JENDRAL PENGELOLAAN RUANG LAUT. (2019), Akselerasi Penyusunan RPZ KKP Bintan, KKP dan DKP Kepri gelar Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Laut [Web log post]. (2019, Oktober 17). Diakses: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/14592-akselerasi-penyusunan-rpz-kkpd-bintan-kkp-dan-dkp-kepri-gelar-sinkronisasi-pemanfaatan-ruang-laut>
- Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Sinjai [Web log post]. (2020, Februari 28). Diakses: <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/02/28/dihadapan-gubernur-bupati-beberkan-realisisi-program-visi-misi-pemkab-sinjai/>
- Prasetyaningsih, Aniek. Djoko Rahardjo. (2018). KOLABORASI AKSI KONSERVASI UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA MANGROVE BAROS. Fakultas Bioteknologi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.
- Rahmayadi, Atika Zahra., Mochammad Nadjip, dan Intan Adhi Perdana Putri LIPI (2019) pendekatan Holistik dan Kolaboratif Untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Hutan Mangrove di Desa Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Dikses : <http://www.ipsk.lipi.go.id/index.php./berita/650-pendekatan-holistik-dan-kolaboratif-untuk-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat-kawasan-hutan-mangrove-di-desa-lubuk-kertang-kabupaten-langket-sumatera-utara>
- Sari, Meika Permata. (2018) Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Lampung bandar Lampung
- Setyadiharja, Rendra., Raja Dacroni, Suherry. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Skeme Hutan Kemasyarakatan. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Jajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 4- Nomor 2, oktober 2019, (Hlm 90-103). Doi Aricle: 10.24905/jip.4.2.2019.90-103
- Swastiningrum, Isma. (2020). 03/02/2020. Klik Hijau.com. Dinamika Mangrove di Indonesia dan Masa Depan Ekowisata di Balikpapan. Diakses <https://klikhijau.com/read/dinamika-mangrove-di-indonesia-dan-masa--depan-ekowisata-di-baliknya/>

The Green Volunteers Mangrove, (2017), Profil Konservasi Mangrove Jogjakarta, Diakses: <http://www.mangrovejogjakarta.com/p/profil.html?m=1> Zed, Mestika. (2008). Metode Kepustakaan Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.